

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2022 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh unit kerja.

Renstra SKPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat khususnya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat terpilih periode 2017-2022.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi barat,

RACHMAD,SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197302191994021004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah (PD))	
2.2 Sumber Daya PD	
2.3 Kinerja Pelayanan PD	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
PD	
Bab III Permasalahan dan isu strategi perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur	
dan Wakil Gubernur	
3.3 Telaahan RENSTRA Dinas Perumahan dan	
Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran	
4.1.1 Tujuan	
4.1.2 Sasaran	
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Kel	
Pendanaan Indikatif	
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Bab VIII Penutup	

LAMPIARAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 2.2.1.b	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Tabel 2.2.1.c	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang
Tabel 2.2.1.d	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal
Tabel 2.2.1.e	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural
Tabel 2.2.2	Daftar Aset Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman .. Tahun 2017 s.d 20122
Tabel 2.2.3.a	Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s.d. 2022
Tabel 2.2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi BaratTahun 2017 s.d. 2022
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja SKPD..... Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s.d. 2022
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 5.1	Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2017-2022 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh unit kerja.

Renstra SKPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat khususnya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat terpilih periode 2017-2022.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sulawesi barat,

RACHMAD,SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197302191994021004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah (PD))	
2.2 Sumber Daya PD	
2.3 Kinerja Pelayanan PD	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
PD	
Bab III Permasalahan dan isu strategi perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur	
dan Wakil Gubernur	
3.3 Telaahan RENSTRA Dinas Perumahan dan	
Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran	
4.1.1 Tujuan	
4.1.2 Sasaran	
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	
5.1 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Kel	
Pendanaan Indikatif	
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Bab VIII Penutup	

LAMPIARAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 2.2.1.b	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi
Tabel 2.2.1.c	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang
Tabel 2.2.1.d	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal
Tabel 2.2.1.e	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural
Tabel 2.2.2	Daftar Aset Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman .. Tahun 2017 s.d 20122
Tabel 2.2.3.a	Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s.d. 2022
Tabel 2.2.3.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi BaratTahun 2017 s.d. 2022
Tabel 2.3	Review Pencapaian Kinerja SKPD..... Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s.d. 2022
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Tabel 5.1	Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif untuk 5 (lima) tahun ke depan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari aspek bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017-2022, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan rasio rumah penduduk yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat dan kawasan permukiman yang sehat dan aman yang di tunjang dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai. yang mengacu pada rumusan dan indikator peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program disusun sesuai dengan kewenangan dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2017-2022.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang, perumahan dan Kawasan permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dari bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran NegaraRI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
 14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
 15. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2010 -2014;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
 21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 Provinsi Sulawesi Barat.

1.3.1. MAKSUD

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan (2017 - 2022).
2. Sebagai tolak ukur untuk dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahunnya.

3. Memudahkan seluruh aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2 TUJUAN

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan tujuan :

1. lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
2. Menrencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan Pembangunan Rumah Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat) untuk keluarga miskin yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang berbasis Tata Ruang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Penyusunan Renstra yang terdiri dari : (1) latar belakang penyusunan Renstra, (2) Landasan hukum penyusunan Renstra, (3) Maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta (4) Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam Bab ini berisi tentang : (1) tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, (2) sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, (3) kinerja pelayanan sampai saat ini, (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat tentang : (1) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; (2) telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; (3) telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat; (4) penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang : (1) visi dan misi SKPD, (2) tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, (3) strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang : (1) rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, (2) kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) Tahun kedepan oleh SKPD.

BABVIII.PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok antara lain :

- a) Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi Tanggung Jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b) Melaksanakan tugas pembantuan dan,
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Gubernur kepadanya.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang Perumahan Rakyat;
- b) Penyelenggaraan bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Perencanaan dan Penyusunan Program Perumahan dan Permukiman;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- d) Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman.

2. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b) Melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan
- c) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
- d) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumatanngaan/kantor
- e) Pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuanagn dan kepegawaian
- f) Pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan Dinas
- g) Pelaksanaan pengelolaa administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h) Pelaksanaan penyusunana program , anggaran dan pelaporan
- i) Pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) pada masing-masing bidang
- j) Pelaksanaan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang
- l) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional
- m) Pelaksanaan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- n) Pelaksaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberiana petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan
- o) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- p) Pelaksanan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas.
- q) Pelaksanaantugaslainnya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- e) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- f) Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- g) Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- h) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- i) Melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j) Melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- k) Melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris, dan perlengkapan kerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;

- b) Melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c) Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d) Melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e) Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f) Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lainnya;
- g) Melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h) Melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i) Melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m) Melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q) Melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- r) Melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;

- s) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dalam melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitas perencanaan perumahan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanan penyusunan program kerja bidang Perumahan;
- b) Pelaksanan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang di bidang perumahan;
- c) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- d) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perumahan, baik tingkat provinsi maupun kab/ kota;
- f) Pelaksanaan pengawasan teknis perumahan;
- g) Pelaksanan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- h) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan bidang perumahan;
- i) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu :

1. Seksi Perumahan Umum dan komersial

Seksi Perumahan Umum dan Komersial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rancangan program kerja perumahan umum dan komersial
- b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan umum dan komersial
- c) penyusunan SPM provinsi bidang perumahan umum dan komersial
- d) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem perumahan umum dan komersial
- e) Melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada kepada para pelaku di tingkat provinsi
- f) Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan tingkat provinsi
- g) Melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilihan rumah serta menyelenggarakan rumah sewa
- h) Melakukan evaluasi dan monetoring penyelenggraan perumahn umum dan komersial di tingkat provinsi
- i) Melaksankan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan umum dan komersial
- j) Melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k) Melaksanakan pemantauan evaluasi kegiatan seksi
- l) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

2. Seksi Perumahan Swadaya

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagian program dan keuangan;
- b) Melaksnanakan survey dan penelitian Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- c) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan swadaya;
- d) Melaksanakan penyelenggarakan pengaturan tentang penataan pembangunan perumahan perkotaan, sarana dan prasana serta fasilitas lingkungan yang meliputi sanitasi, air limbah, instansi

pengelolaan air limbah (IPAL), drainase dan jalan lingkungan perumahan perkotaan

- e) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/pemilik sarana dan prasarana dan fasilitas lingkungannya
- f) Melakukan evaluasi , pengkajian dan pengarahannya terhadap perbaikan lingkungan perumahan perkotaan
- g) Melaksanakan penyusunan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan perkotaan
- h) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen perumahan formal dan swadaya
- i) Melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Seksi Perumahan Khusus

Seksi Perumahan Khusus mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksi perumahan khusus
- b) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan perumahan khusus
- c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat provinsi
- d) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian pada tingkat kabupaten/kota
- e) Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi
- f) Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi

- g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
- h) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan di provinsi
- i) Melakukan fasilitas penyusunan, koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan tingkat provinsi
- j) Melakukan koordinasi dan sosialisasi nspm penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota
- k) Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota
- l) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang permukiman
- b) Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang di bidang permukiman
- c) Pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait
- d) Pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- e) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan permukiman, baik tingkat provinsi maupun Kab
- f) Pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi permukiman
- g) Pelaksanaan pengawasan teknis permukiman
- h) Pelaksanaan penyusunan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan

- i) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang permukiman
- j) Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan uptd
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman
- l) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam menjalankan fungsi diatas, bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Seksi Permukiman

Seksi Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi permukiman;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerja seksi permukiman;
- c. Penyusunan nspm provinsi bidang permukiman;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem permukiman;
- e. Melakukanfasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan permukiman kepada para pelaku di tingkat provinsi;
- f. Melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi;
- g. Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- h. Melakukan pengendalian penyelenggaraan bidang permukiman ditingkat provinsi;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggraan permukiman di tingkat provinsi;
- j. Melaksanakan laporan monev kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi melaksanakan penyedian data dan informasi permukiman
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2. Seksi pembangunan permukiman

Seksi Pembangunan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinassesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- f. Melaksanakan pemanfaatan ruang;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oerorganisasi

3. Seksi Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

Seksi Infrastruktur perkotaan dan pedesaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi infraturuktur perkotaan dan perdesaan
- b. Melaksakan penyusunan bahan rencana program kerja seksi infrastruktur perkotaan dan perdesaan

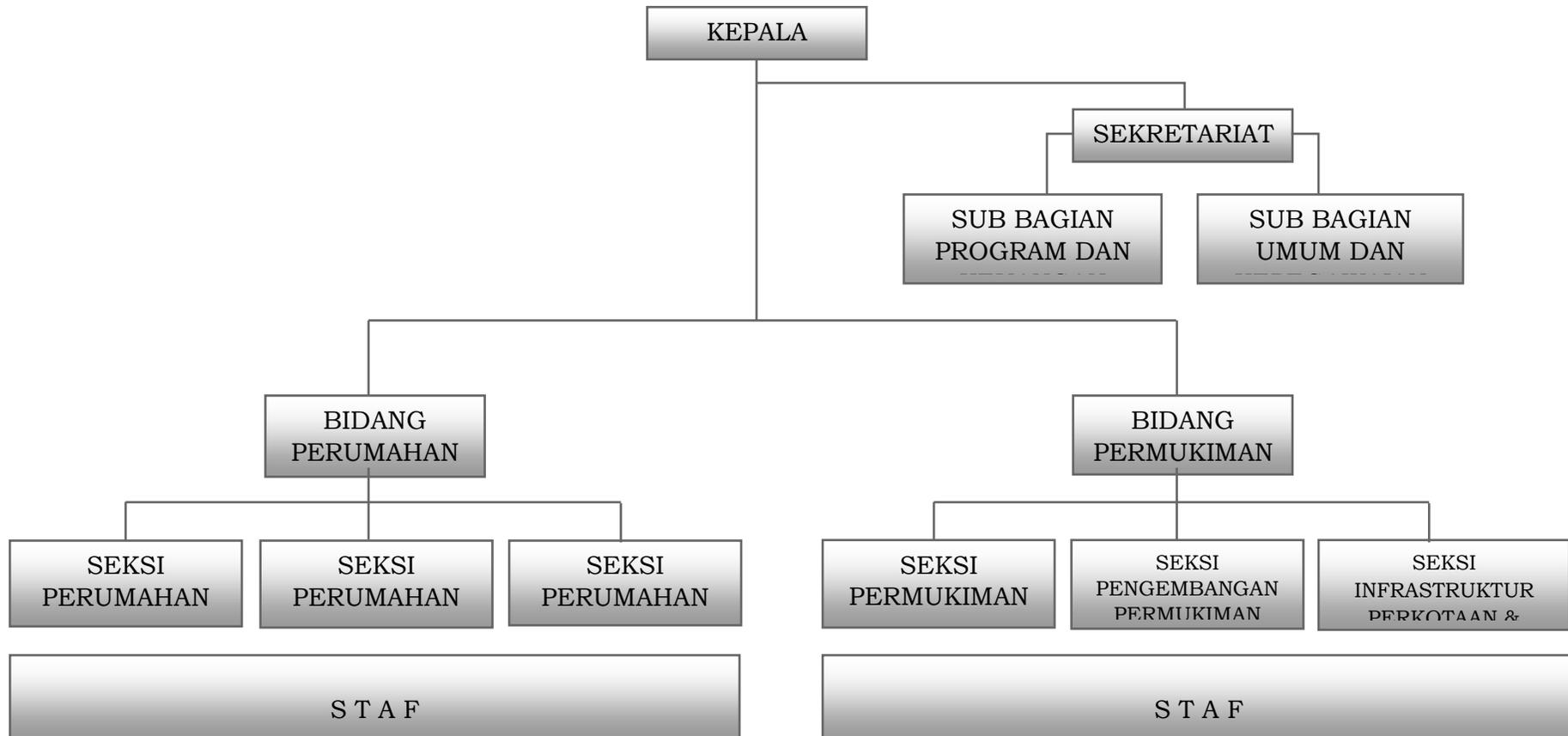
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi
- d. Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk menyiapkan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat provinsi
- e. Melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi
- f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dibidang perumahan
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan
- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan provinsi
- i. Melakukan fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan di tingkat provinsi
- j. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dan sosialisasi nspm penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan ditingkat provinsi lintas kabupaten/kota
- k. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c) Bidang sebanyak 2 Bidang yaitu :
 1. Bidang Perumahan yang membawahi;
 - Seksi Perumahan Umum dan Komersial
 - Seksi Perumahan Swadaya
 - Seksi Perumahan Khusus
 2. Bidang Permukiman yang membawahi :
 - Seksi Permukiman
 - Seksi Pengembangan Permukiman
 - Seksi Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT



2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari Kepala Dinas (Jabatan eselon II.a) yang dijabat oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris (jabatan eselon III.a), 2 (dua) orang Kepala Bidang (jabatan eselon III.a), 2 (dua) orang kepala sub bagian (jabatan eselon IV.a), dan 6 (enam) orang kepala Seksi (jabatan eselon IV.a), Personil keseluruhan 93 orang terdiri dari PNS 53 orang dan honorer 40 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 35 orang PNS dan 20 orang honorer dengan total keseluruhan laki-laki sebanyak 55 orang, perempuan 18 orang PNS dan 20 orang honorer dengan total keseluruhan perempuan sebanyak 38 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/a 3 (tiga) orang, golongan II/b 4 (empat) orang, golongan II/c 2 (dua) orang, golongan II/d 3 (tiga) orang, golongan III/a 6 (enam) orang, golongan III/b 16 (enam belas) orang, golongan III/c 11 (sebelas) orang, golongan III d 3 (tiga) orang, golongan IV/a 1 (satu), golongan IV/b 2 (dua) orang, golongan IV/c 2 (dua) orang, dengan karakteristik sebagai berikut :

TABEL 1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERUMAHAN		BIDANG PERMUKIMAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a							0	0	0
I/b							0	0	0
I/c							0	0	0
I/d							0	0	0
II/a				1	1	1	1	2	3
II/b	3				1		4	0	4
II/c				2			0	2	2
II/d		1	1		1		2	1	3
III/a	2	1	2		1		5	1	6
III/b		2	3	3	1	6	4	11	15
III/c	2	2	3	1	1	2	6	5	11
III/d					2	1	2	1	3
IV/a						1	0	1	1
IV/b			1		1	1	2	1	3
IV/c	2						2	0	2
IV/d							0	0	0
Diklatpim II	1						1	0	1
Diklatpim III			1		1		2	0	2
Diklatpim IV	1	1	2		1	1	4	2	6
Honorer	10	7	5	9	5	4	20	20	40
PNS	9	6	10	7	9	12	28	25	53
Jumlah	19	13	15	16	14	16	48	45	93

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Januari 2018)

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI HONORER BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN									
GOLONGAN/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERUMAHAN		BIDANG PERMUKIMAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI		2					0	2	2
SLTP/MTS							0	0	0
SLTA/MA	6	1	2	2		1	8	4	12
D1							0	0	0
D2							0	0	0
D3	1	1					1	1	2
S1	3	3	3	7	5	3	11	13	24
S2							0	0	0
S3							0	0	0
JUMLAH TOTAL	10	7	5	9	5	4	20	20	40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Januari 2018)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 3 berikut ini :

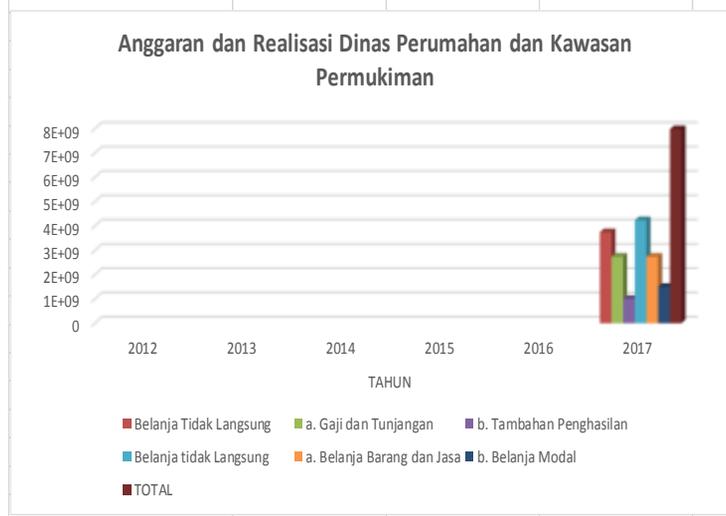
TABEL 3								
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN								
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	TAHUN PEROLEHAN					TOTAL	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
1	Gedung kantor						1	1 buah
2	Alat ukur universal lain-lain drone						1	1 buah
3	Alat ukur universal lain-lain						9	9 buah
4	F - c 3						3	3 unit
5	Lap Top (Lenovo)						5	5 unit
6	Printer Epson L365 dan L1300						5	5 unit
7	Meja Kerja Pejabat Esalon II						1	1 buah
8	Kursi Rapat						20	20 buah
9	Meja Kerja Pejabat Esalon III						3	3 buah
10	Meja Pejabat Esalon IV						8	8 buah
11	Meja Kerja						10	10 buah
12	Meja Rapat Pejabat Esalon II						1	1 buah
13	Kursi kerja pejabat lain-lain						27	27 buah
14	Kursi tamu ruang tunggu pejabat esalon II						1	1 buah
15	Lemari arsip						3	3 buah
16	Proyektor pless ettemen						1	1 buah
17	Wireless						1	1 buah
18	Kamera digital						2	2 buah
19	Alat ukur universal jps						1	1 buah

Sumber : Pengurus barang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Januari 2018)

2.2.3 Anggaran

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Sulawesi Barat. Khusus untuk Tahun Anggaran 2017, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 4.234.675.968,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.742.978.166,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.234.675.968,- Secara lengkap anggaran yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JENIS BELANJA	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung						3.742.978.166
a. Gaji dan Tunjangan						2.739.165.968
b. Tambahan Penghasilan						1.003.812.198
Belanja tidak Langsung						4.234.675.968
a. Belanja Barang dan Jasa						2.739.165.968
b. Belanja Modal						1.495.510.000
TOTAL						7.977.654.134



Anggaran yang disediakan belum dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang menyangkut pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya terdapat kegiatan penyusunan RKPd, RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RENJA, Program Bidang Perumahan yang mencakup layanan rumah layak huni yang terjangkau, Bidang Permukiman yang mencakup Lingkungan yang Sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan Utilitas yang memadai, Tata Ruang serta Evaluasi dan Pelaporan, Sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Realisasi Pencapaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
				2018		2019		2020		2021		2022		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)										
1	Cakupan warga negara yang terkena bencana provinsi atau relokasi program pemerintah	2 SPM		2 SPM	0	2 SPM	1.055	2 SPM	5.700	2 SPM	38.400	2 SPM	42.700	0					0,00				
2	Cakupan kawasan permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	32 kawasan	363,41 Ha	0,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	43,65%	8.250	56,35%	10.650	0					32 kawasan				
3	Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	1.250	50,00%	1.250	0					0,00				

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

2.3.1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Barat, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Sulawesi Barat.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Sulawesi Barat.

2.3.1. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Sulawesi Barat, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah

yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen data Perumahan dan Kawasan Permukiman, baik di level daerah maupun di level organisasi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya penganggaran yang disediakan berdasarkan dengan perencanaan dalam peningkatan Rumah Layak Huni Marasa, sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan mengalami ketidaksesuaian;
3. Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat yang masih rendah, sehingga kualitas infrastruktur permukiman pedesaan /kumuh/nelayan serta kawasan berbasis tata lingkungan juga masih rendah;

4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
5. Sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pengemangan perumahan dan kawasan permukiman masih terbatas;

Tabel. 3.1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Isu Starategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1		2	3	4
1.	Jumlah rumah yang terkena bencana Provinsi	Masih rendahnya penyediaan rumah yang terkena Bencana Provinsi	Belum adanya pendataan reahabilitasi korban bencana Provinsi	Banyaknya potensi Bencana (InaRisk) antara lain Gempa Bumi Tanah Longsor Sunami Tanah kekeringan Banjir Bandang Masih ada rumah korban akibat bencana alam yang belum ditangani
2	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Masih adanya lokasi kumuh yang belum Ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Masih banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah (Tidak memperhatikan pola Tata Ruang) Masih banyaknya kondisi PSU perumahan yang kurang diperhatikan/ terabaikan oleh pengembang Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya Kurang tersosialisasikanna program-program pemerintah terkait kekumuhan Masih belum berkembangnya potensi ekonomi dan sosial di kawasan Munculnya gejala kekumuhan akibat perkembangan desa yang menuju kota

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah lima tahun ke depan. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

“ Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq “

Visi Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu:

“ Sulawesi Barat Maju “

Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

“ Sulawesi Barat Malaqbig “

Kondisi daerah yang maju dan sejahtera, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan ekonomi, peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB) perkapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran dengan tetap memegang teguh adat budaya dan sopan santun. Dengan ditunjang dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat opini pengelolaan keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan sejumlah Misi Pembangunan Daerah. Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2022, ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap
Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program pengembangan Perumahan	Masih banyaknya RTLH yang belum ditangani	<ul style="list-style-type: none"> - Lampiran UU 23 Th 2014 membatasi kewenangan Pemda untuk menangani RTLH - Alokasi anggaran yang terbatas - Pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan RTLH tidak maks - Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan 	Komitmen dan kemampuan Pemkab dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH semakin baik/ tinggi

		Masih banyak <i>backlog</i> yang belum diakomodasi penyediaan rumahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang koordinasi antara pengembang dengan Pemerintah - Kurang tersosialisasikan nya PD yang menangani urusan bidang perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen PD untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional - Semangat dan etos kerja Personil cukup tinggi
		PSU yang ada kurang diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> - Rincian tugas antar PD dan unit kerja msih ada yang tumpang tindih - Belum ada kejelasan pembagian wilayah kewenangan untuk PD/ Unit Kerja yang mempunyai kesamaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada rencana yang secara periodic mengevaluasi SOTK PD - Ada forum koordinasi antar PD
		Masih ada lingkungan perumahan/ permukiman yang tidak tertata	Belum ada produk hukum lokal terkait peñataan perumahan / permukiman (kalaupun ada sangat rendah penegakan sanksinya)	Kualitas SDM cukup mendukung
2	Program perbaikan perumahan korban bencana alam	Masih ada rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani PD	<ul style="list-style-type: none"> - Ketiadaan alokasi anggaran - Belum ada NSPKnya - SPM Penanganan Rumah Korban Bencana belum ada 	Kewenangan penanganan rumah korban bencana alam sudah disebut dalam lamp UU 23 Th 2014
3	Program Lingkungan sehat perumahan	Masih ada lokasi kumuh yang tidak ditangani	Belum Maksimalnya intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kumuh sudah berSK - Ada kewenangann yang jelas untuk penanganan kumuh sesuai UU 23 Th 2014
4	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Kegiatan pemberdayaan dikuatirkan tumpang tindih dengan tusi PD lain	Komitmen Pemerintah Pusat melalui Program-program nasional, spt: pengurangan kumuh melalui Program KOTAKU; dan
5.	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Masih ada lokasi kawasan permukiman yang tidak ter-cover dengan prasarana sarana dan utilitas	Belum Maksimalnya intervensi kegiatan fisik dari alokasi anggaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kumuh sudah berSK - Ada kewenangann yang jelas untuk penanganan kumuh sesuai UU 23 Th 2014
6.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi	Masih rendahnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum memadai	Belum ada produk hukum lokal terkait peñataan perumahan / permukiman (kalaupun ada sangat rendah penegakan sanksinya)	Kualitas SDM cukup mendukung

Sumber : Analisis permasalahan pelayanan DISPERKIM, 2017

Misi Gubernur terpilih Tahun 2017-2022 adalah :

- 1. Membangun Sumber daya manusia berkualitas berkepribadian dan berbudaya,** menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif, jujur dan professional.
- 2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih Modern dan Terpercaya,** mewujudkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsip *good governance*.
- 3. Membangun dan Konektifitas antar wilayah berbasis unggulan strategis,** menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau- pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat.
- 4. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan berdayang saing tinggi,** Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
- 5. Mengarustamakan lingkungan Hidup untuk pembangunan berkelanjutan,** meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah.

Sejalan dengan visi dan misi gubernur tersebut terdapat pernyataan visi dan misi Ditjen Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumahan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM.
- c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

Selain telaahan terhadap renstra Ditjen Perumahan Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu :

- ✚ UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ✚ UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ✚ UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✚ UUNo.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ✚ PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang- undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Swadaya, maka visi Direktorat Perumahan Swadaya adalah :

“TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”.

Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- Layak, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.
- Produktif, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.
- Berdaya saing, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya.
- Berkelanjutan, yaitu : permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Kedudukan Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan</u> : Penjabaran tujuan nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, misi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan</u>: Mengacu kepada RPJP Nasional. 2. <u>Ruang Lingkup</u>: Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan:</u> Berpedoman kepada RPJP Nasional. 2. <u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi :</u> Penjabaran Visi,Misi Program Presiden yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi pembangunan nasional; ➤ Kebijakan Umum; ➤ Kerangka Ekonomi Makro; ➤ Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1.<u>Kedudukan:</u> Berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. 2.<u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3.<u>Muatan/Isi :</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PenjabaranVisi, Misi Program Presiden yang memuat : ➤ Strategi pembangunan Daerah; ➤ Arah Kebijakan keuangan daerah; ➤ Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka regulasi b.Kerangka anggaran
<p>Rencana Strategis (RENSTRA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan:</u> Renstra Kementrian/ Lembaga berpedomanpada RPJM Nasional. 2. <u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi :</u> Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan:</u> Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPJ) berpedoman padaRPJM Daerah. 2. <u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi :</u> Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

<p>Rencana Kerja Pemerintah (RKP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan:</u> Merupakan penjabaran RPJM Nasional 2. <u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Prioritas pembangunan nasional; ➢ Rancangan Kerangka ➢ Ekonomi Makro; ➢ Arah Kebijakan Fiskal; ➢ Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kedudukan:</u> Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP 2. <u>RuangLingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Prioritas pembangunan daerah; ➢ Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; ➢ Arah Kebijakan Keuangan Daerah; ➢ Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka regulasi b. Kerangka anggaran
<p>Rencana Kerja (RENJA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>1.Kedudukan:</u> Berpedoman kepada Renstra K-L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan paguindikatif 2. <u>Ruang Lingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi :</u> Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP. 2. <u>RuangLingkup:</u> Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun. 3. <u>Muatan/Isi :</u> Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber: Bappenas (maret 2005), dalam Hand Out "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi

dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu menangani isu-isu strategis dalam bidang investasi yaitu perlunya pengembangan kapasitas dan keterampilan aparatur agar mereka mampu secara kreatif dan responsif menarik investor serta perlunya promosi potensi daerah secara intensif.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase permukiman.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan mewujudkan Ruang terbuka hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*),

terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

1. Tujuan Jangka Menengah OPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

2. Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan pada tahun 2017 - 2022 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- b. Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat ;
- d. Pembinaan kelembagaan (organisasi dan SDM) serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman.
- e. Pengembangan pengelolaan sanitasi lingkungan.
- f. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan dan drainase lingkungan ,
- g. Peningkatan Akses Air Bersih/Air Minum.
- h. Penataan kawasan permukiman kumuh.
- i. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- j. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman ;
- k. Penataan dan Pengembangan Pemakaman Umum
- l. Peningkatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

N O	Tujuan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Sasaran	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya SPM Provinsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan warga negara yang terkena bencana provinsi atau relokasi program pemerintah	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah warga negara korban terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah kawasan permukiman yang memperoleh peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	32 kawasan				
3	Meningkatkan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah orang atau badan hukum yang mendapatkan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum kawasan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN SASARAN

5.1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah- langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaahan pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung,

sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Provinsi Sulawesi Barat, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar adalah :

5.1.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Faktor Internal meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

a) Faktor Eksternal

Faktor meliputi peluang dan ancaman, dalam konteks pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Barat**

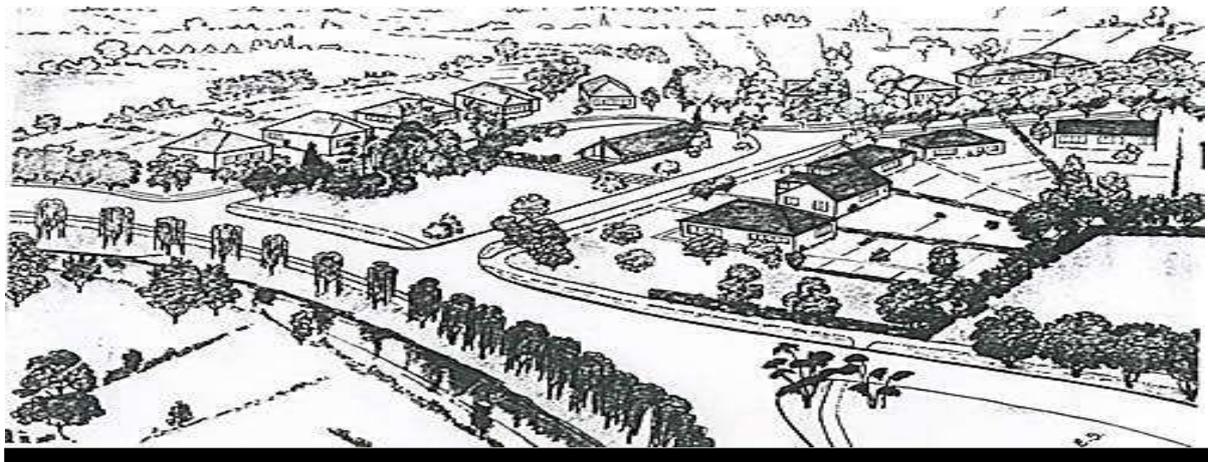
1. Perumahan

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	Peluang
1. Nilai Ekonomi lahan cenderung semakin meningkat. 2. Pola Perkembangan lahan berkembang pesat. 3. Lahan masih kosong masih terbuka untuk dikembangkan ketersediaan lahan masih cukup besar. 4. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Provinsi Sulawesi Barat. 5. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perumahan.	1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun perumahan. 2. Perkembangan wilayah cukup pesat. 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi. 4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan Perumahan kawasan
Kelemahan	Ancaman
1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun perumahan. 2. Perkembangan wilayah cukup pesat. 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi. 4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan	1. Pola pemanfaatan ruang yang masih mengabaikan ketentuan 2. Pembangunan yang tidak memiliki izin 3. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi 4. Lemahnya penegakan

2. Kawasan Permukiman

INTERNAL		EKSTERNAL	
Kekuatan		Peluang	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan permukiman . 3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan 2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai 3. Tingginya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman dan perumahan 4. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai 5. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan 6. Adanya bantuan pusat dan provinsi 		
Kelemahan		Ancaman	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat permintaan/ kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan 2. Semakin bertambahnya populasi penduduk. 		

Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Setiap sasaran strategi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi yang merupakan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek

operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan : Pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena Bencana Provinsi

- Program pengembangan perumahan, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Rehabilitasi bagi yang terkena korban bencana Provinsi.
- b. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

2. Arah Kebijakan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat.

- Program penataan kawasan permukiman, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat.
- b. Penataan Kawasan Kumuh.
- c. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan lingkungan berimbang.
- d. Pembangunan Jalan Lingkungan.
- e. Pembangunan dan Pemeliharaan drainase.

3. Arah Kebijakan : Peningkatan sumber daya aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

- Program peningkatan disiplin aparatur, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Pengadaan pakaian dinas;
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- c. Kegiatan Sistem Kepegawaian

4. Arah Kebijakan : Peningkatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

- Program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Sosialisasi Rumah khusus (Nelayan, suku adat terpencil) provinsi Sulawesi Barat;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat;

- c. Sosialisasi rumah swadaya provinsi Sulawesi Barat;
- d. Sosialisasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sulawesi Barat;
- f. Sinkronisasi Program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sulawesi Barat;
- g. Sosialisasi Rumah Umum dan Komersial Provinsi Sulawesi Barat.

5. Arah Kebijakan : Peningkatan penataan dan kualitas kawasan permukiman kumuh

- Program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, dengan fokus kegiatan pada :

- a. Penyusunan peraturan Gubernur tentang penetapan kawasan kumuh berskala provinsi di provinsi Sulawesi Barat;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Pengembangan kawasan permukiman kumuh;
- e. Penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. Penyusunan Masterplan dan perencanaan pengembangan kawasan Minawisata Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu terdapat program dan kegiatan rutin yang bertujuan meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintah, yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur, dengan fokus kegiatan pada :
 - a Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c Penyediaan alat tulis kantor
 - d Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - e Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- f Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
 - g Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi);
2. Program peningkatan penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
 - b. Peningkatan koordinasi kabupaten/kota dan lintas kementerian/ lembaga.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROPINSI SULAWESI BARAT																					
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Bidang Penanggung Jawab						
					2018		2019		2020		2021		2022								
1	2	3	4	5	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	18				
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
1	1	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7.796.452.649,39				Rp 15.000.000.000		Rp 55.896.433.875,87		Rp 62.671.596.602,40		Rp 147.244.483.128					
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rp	679.690.000	14%	1.389.538.750,00	14%	Rp 1.399.434.150	14,81%	Rp 1.505.000.000	29%	Rp 2.933.700.000	29%	Rp 2.933.862.727	100%	Rp 10.161.535.627	SEKRETARIAT		
0	0	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	jenis	Rp 49.190.000	8%	32.320.750,00	7,45%	Rp 31.991.250	15,14%	Rp 65.000.000	34,94%	Rp 150.000.000	34,94%	Rp 150.000.000	100%	Rp 429.312.000		
0	0	1	8	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi ke dalam daerah	rapat	Rp 211.100.000	11%	200.800.000,00	13,84%	Rp 250.800.000	14,35%	Rp 260.000.000	30,36%	Rp 550.000.000	30,36%	Rp 550.000.000	100%	Rp 1.811.600.000		
0	0	1	7	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi ke luar daerah	rapat	Rp 225.405.200	17%	401.500.000,00	15,20%	Rp 351.500.000	15,56%	Rp 360.000.000	25,94%	Rp 600.000.000	25,94%	Rp 600.000.000	100%	Rp 2.313.000.000		
0	0	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah media cetak yang digunakan	media	Rp 60.000.000	7%	9.100.000,00	10,64%	Rp 14.780.000	10,80%	Rp 15.000.000	36,00%	Rp 50.000.000	36,00%	Rp 50.000.000	100%	Rp 138.880.000		
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa jaminan barang milik Negara	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	50,00%	Rp 30.000.000	50,00%	Rp 30.000.000	100%	Rp 60.000.000		
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa tenaga pendukung administrasi	OK		20%	529.800.000,00	20,02%	Rp 533.900.000	20,02%	Rp 534.000.000	20,05%	Rp 534.800.000	20,05%	Rp 534.800.000	100%	Rp 2.667.300.000		
0	0	1	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	Rp 32.000.000	9%	65.598.000,00	6,80%	Rp 47.188.000	11,68%	Rp 81.000.000	36,03%	Rp 250.000.000	36,03%	Rp 250.000.000	100%	Rp 693.786.000		
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening kebutuhan telepon/jaringan internet dan Listrik	rekening	Rp 72.000.000	12%	69.420.000,00	14,54%	Rp 83.754.900	14,75%	Rp 85.000.000	29,32%	Rp 168.900.000	29,34%	Rp 169.062.727	100%	Rp 576.137.627		
0	0	1	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	rapat	Rp 29.994.800	8%	60.800.000,00	8,13%	Rp 65.120.000	9,36%	Rp 75.000.000	37,46%	Rp 300.000.000	37,46%	Rp 300.000.000	100%	Rp 800.920.000		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak, penggandaan dan penjiilan dokumen	cetak		3%	20.200.000,00	3,04%	Rp 20.400.000	4,47%	Rp 30.000.000	44,74%	Rp 300.000.000	44,74%	Rp 300.000.000	100%	Rp 670.600.000		
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana Aparatur		Rp	1.418.000.000	18%	893.231.857,00	6,90%	Rp 351.030.000	11,99%	Rp 610.000.000	31,63%	Rp 1.608.733.876	32%	Rp 1.623.733.876	100%	Rp 5.086.729.609	SEKRETARIAT
0	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	Rp 200.000.000	48%	408.680.000,00	6,52%	Rp 55.000.000	9,48%	Rp 80.000.000	17,78%	Rp 150.000.000	17,78%	Rp 150.000.000	100%	Rp 843.680.000		
0	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	unit		5%	33.101.857,00	14,54%	Rp 90.680.000	16,03%	Rp 100.000.000	32,06%	Rp 200.000.000	32,06%	Rp 200.000.000	100%	Rp 623.781.857		
0	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara per bulan	unit	Rp 68.000.000	15%	199.610.000,00	13,58%	Rp 175.140.000	15,51%	Rp 200.000.000	27,14%	Rp 350.000.000	28,30%	Rp 365.000.000	100%	Rp 1.289.750.000		
0	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Servis, Penjaga malam dan administrasi yang terbayarkan	unit	Rp 150.000.000	34%	251.840.000,00	0,00%	Rp -	10,93%	Rp 80.000.000	27,33%	Rp 200.000.000	27,33%	Rp 200.000.000	100%	Rp 731.840.000		
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (motor dan mobil)	unit	Rp 1.000.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp -	12,23%	Rp 100.000.000	43,88%	Rp 358.733.876	43,88%	Rp 358.733.876	100%	Rp 817.467.752		
0	0	2	1	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan perlengkapan mebeleur kantor	unit		0%	3.87%	Rp 30.210.000	6,41%	Rp 50.000.000	44,86%	Rp 350.000.000	44,86%	Rp 350.000.000	100%	Rp 780.210.000			
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp	-	2%	31.916.265,00	11,65%	Rp 247.555.000	16,24%	Rp 345.000.000	35,30%	Rp 750.000.000	35%	Rp 750.000.000	100%	Rp 2.124.471.265	SEKRETARIAT
0	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur sipil negara (pegawai) dalam pendidikan dan pelatihan formal	orang	Rp	-	5%	31.916.265,00	0,00%	Rp -	9,33%	Rp 65.000.000	43,05%	Rp 300.000.000	43,05%	Rp 300.000.000	100%	Rp 696.916.265	
0	0	5	2	Bimbingan Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknik bidang perumahan dan permukiman	orang	Rp	-	0%	0,00	30,65%	Rp 176.770.000	17,34%	Rp 100.000.000	26,01%	Rp 150.000.000	26,01%	Rp 150.000.000	100%	Rp 576.770.000	
0	0	5		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp	-	0%	0,00	15,70%	Rp 70.785.000	17,75%	Rp 80.000.000	33,28%	Rp 150.000.000	33,28%	Rp 150.000.000	100%	Rp 450.785.000	
0	0	5	3	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang ikut dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	orang	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp -	25,00%	Rp 100.000.000	37,50%	Rp 150.000.000	37,50%	Rp 150.000.000	100%	Rp 400.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3%	233.072.726,39	10,76%	Rp 753.605.850	12,99%	Rp 910.000.000	36,04%	Rp 2.525.000.000	37%	Rp 2.585.000.000	100%	Rp 7.006.678.576	SEKRETARIAT	
		Penyusunan Renstra/Renja/Lakip/ dan LPPD	Jumlah laporan yang telah disusun	dokumen	Rp	-	0,00	0,00%	Rp 10.000.000	0,00%	Rp 35.000.000	0,00%	Rp 50.000.000	0,00%	Rp 50.000.000	0%	Rp 145.000.000		
0	6	5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggung jawaban SKPD	laporan	Rp	-	13,64%	Rp 15.000.000	13,64%	Rp 15.000.000	36,36%	Rp 40.000.000	36,36%	Rp 40.000.000	100%	Rp 110.000.000		
			Penyusunan Katalog Data Perumahan	Jumlah katalog data informasi yang telah disediakan	katalog	Rp	-	0,00%	Rp -	33,33%	Rp 50.000.000	33,33%	Rp 50.000.000	33,33%	Rp 50.000.000	100%	Rp 150.000.000		
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	laporan	Rp	-	10,46%	Rp 11.100.000	14,14%	Rp 15.000.000	37,70%	Rp 40.000.000	37,70%	Rp 40.000.000	100%	Rp 106.100.000		
			Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan/SPJ/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD	Jumlah laporan Pertanggung jawaban keuangan	laporan	Rp	-	16,67%	Rp 19.000.000	13,16%	Rp 15.000.000	35,09%	Rp 40.000.000	35,09%	Rp 40.000.000	100%	Rp 114.000.000		
			Pengembangan Basis data, dan pemutakhiran Sistem Informasi perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah kegiatan untuk pengembangan data yang akurat dalam sistem informasi di Provinsi Sulawesi Barat	kegiatan	Rp	-	30,06%	Rp 386.760.000	7,77%	Rp 100.000.000	31,09%	Rp 400.000.000	31,09%	Rp 400.000.000	100%	Rp 1.286.760.000		
			Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah laporan perencanaan yang tersedia	laporan	Rp	-	0,00%	Rp -	3,61%	Rp 15.000.000	48,19%	Rp 200.000.000	48,19%	Rp 200.000.000	100%	Rp 415.000.000		
			Penyusunan LPPD SKPD	Jumlah dokumen LPPD SKPD	dokumen	Rp	-	0,00%	Rp -	11,76%	Rp 40.000.000	44,12%	Rp 150.000.000	44,12%	Rp 150.000.000	100%	Rp 340.000.000		
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan manajemen aset	dokumen	Rp	15.350.000	4%	Rp 9.759.250,00	8,10%	Rp 22.000.000	14,72%	Rp 40.000.000	36,80%	Rp 100.000.000	100%	Rp 271.759.250		
			Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah RKA/P/DPPA-SKPD	dokumen	Rp	-	0%	Rp 12.350.000	11,78%	Rp 15.000.000	39,26%	Rp 50.000.000	39,26%	Rp 50.000.000	100%	Rp 127.350.000		
			Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	Rp	-	7%	Rp 8.400.000,00	4,40%	Rp 5.450.000	8,07%	Rp 10.000.000	40,37%	Rp 50.000.000	100%	Rp 123.850.000		
			Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta Musrebang	Jumlah dokumen Renja dan Evaluasi SKPD serta Musrebang	dokumen	Rp	-	10%	Rp 100.782.000,00	14,80%	Rp 147.797.000	15,02%	Rp 150.000.000	30,04%	Rp 300.000.000	100%	Rp 998.579.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah Laporan Monitoring	laporan	Rp	-	4%	Rp 49.531.476,39	3,76%	Rp 46.868.750	12,03%	Rp 150.000.000	40,12%	Rp 500.000.000	100%	Rp 1.246.400.226		
			Penyediaan Pengelolaan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah tenaga honorer yang terbayarkan	Orang	Rp	-	0%	Rp 0,00	31,25%	Rp 50.000.000	31,25%	Rp 50.000.000	37,50%	Rp 60.000.000	100%	Rp 160.000.000		
			Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Idokumen RKA/DPA SKPD	dokumen	Rp	22.150.000	14%	Rp 45.700.000,00	19,74%	Rp 64.100.000	20,01%	Rp 65.000.000	23,09%	Rp 75.000.000	100%	Rp 324.800.000		
			Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	laporan	Rp	-	8%	Rp 8.900.000,00	4,98%	Rp 5.450.000	13,72%	Rp 15.000.000	36,58%	Rp 40.000.000	100%	Rp 109.350.000		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Standar Operasional (SOP)	dokumen			0%	Rp 0,00	6,98%	Rp 15.000.000	46,51%	Rp 100.000.000	46,51%	Rp 100.000.000	100%	Rp 215.000.000		
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	dokumen			0%	Rp 0,00	33,33%	Rp 100.000.000	33,33%	Rp 100.000.000	33,33%	Rp 100.000.000	100%	Rp 300.000.000		
0			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Rp	-	9%	Rp 10.000.000,00	6,86%	Rp 7.730.100	13,31%	Rp 15.000.000	35,48%	Rp 40.000.000	100%	Rp 112.730.100		
0	0		Penyelenggaraan forum SKPD	Jumlah orang yang mengikuti forum	orang	Rp	-	0%	Rp 0,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp 150.000.000	57,14%	Rp 200.000.000	100%	Rp 350.000.000		
0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur				9%	Rp 59.000.000,00	20,80%	Rp 143.690.000	18,82%	Rp 130.000.000	25,92%	Rp 179.000.000	100%	Rp 690.690.000	SEKRETARIAT	
0	3		Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	pasang	Rp	12.000.000	19%	Rp 59.000.000,00	14,33%	Rp 45.000.000	15,92%	Rp 50.000.000	25,48%	Rp 80.000.000	100%	Rp 314.000.000		
		3	5	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	pasang	Rp	-	0%	Rp 0,00	25,37%	Rp 74.790.000	23,75%	Rp 70.000.000	25,44%	Rp 75.000.000	100%	Rp 294.790.000	
			Pembuatan atribut PNS	Jumlah atribut PNS yang diadakan	paket	Rp	-	0%	Rp 0,00	29,18%	Rp 23.900.000	12,21%	Rp 10.000.000	29,30%	Rp 24.000.000	100%	Rp 81.900.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		Rp	85.546.300	0%	0,00	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	Rp	-	BIDANG PERUMAHAN
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	36.082.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi	laporan	Rp	49.464.300	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Rp	314.380.000	100%	1.042.916.878,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	1.042.916.878	BIDANG PERUMAHAN
	Sosialisasi Rumah Khusus (Nelayan, Suku Adat Terpencil) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp	14.380.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	300.000.000	100%	656.000.000,00	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	100%	Rp	656.000.000	
	Sosialisasi Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp	14.380.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
	Sosialisasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp	-	0%	135.600.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	135.600.000	
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp	50.000.000	100%	135.179.878,00	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	100%	Rp	135.179.878	
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	laporan	Rp	50.000.000	100%	116.137.000,00	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	100%	Rp	116.137.000	
	Sosialisasi Rumah Umum dan Komersil Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

Program Pengembangan Perumahan		Cakupan warga negara yang terkena bencana provinsi atau relokasi program pemerintah		Rp	20.000.000	0%	Rp	-	1,20%	Rp	1.055.000.000	6,49%	Rp	5.700.000.000	43,71%	Rp	38.400.000.000	48,60%	Rp	42.700.000.000	100%	Rp	87.855.000.000	BIDANG PERUMAHAN
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang pembangunan dan rehabilitasi perumahan Masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang pembangunan dan rehabilitasi Perumahan masyarakat miskin	dokumen			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	25,00%	Rp	100.000.000	75,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	400.000.000	
	Pembangunan dan rehabilitasi perumahan Masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Perumahan masyarakat miskin	unit			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	88,89%	Rp	4.000.000.000	11,11%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	4.500.000.000	
	Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi masyarakat miskin (Marasa)	laporan			0%	Rp	0,00	22,22%	Rp	200.000.000	27,78%	Rp	250.000.000	50,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	900.000.000	
	Masterplan kawasan Perumahan Aparatur Sipil Negara ASN dan Kawasan Perumahan ASN Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Masterplan kawasan Perumahan Aparatur Sipil Negara ASN dan Kawasan Perumahan ASN Provinsi Sulawesi Barat	dokumen			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	300.000.000	
	Pemeliharaan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)	Jumlah Pemeliharaan Rumah Susun Sewa	unit			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	25,00%	Rp	100.000.000	75,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	400.000.000	
	Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat (RISHA)	Jumlah Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat (RISHA)	unit	Rp	-	0%	Rp	0,00	27,93%	Rp	155.000.000	18,02%	Rp	100.000.000	54,05%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	555.000.000	
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp	-	0%	Rp	0,00	16,67%	Rp	100.000.000	33,33%	Rp	200.000.000	50,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	600.000.000	
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	laporan	Rp	-	0%	Rp	0,00	18,18%	Rp	100.000.000	27,27%	Rp	150.000.000	54,55%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	550.000.000	
	Sosialisasi Tentang Perumahan	Jumlah peserta yang terlibat dalam Sosialisasi Rumah Umum dan Komersil Provinsi Sulawesi Barat	orang	Rp	20.000.000	0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	300.000.000	
	Penyusunan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat				0%	Rp	0,00	36,00%	Rp	450.000.000	40,00%	Rp	500.000.000	24,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	1.250.000.000	
	Penyusunan Peraturan Gubernur Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Rangsang Mamuju	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Rangsang Mamuju	dokumen			0%	Rp	0,00	11,11%	Rp	50.000.000	22,22%	Rp	100.000.000	66,67%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	450.000.000	
	Fasilitasi Kelompok kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	kelompok			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	25,00%	Rp	100.000.000	75,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	400.000.000	
	Penyusunan Perda PKP	Jumlah dokumen Penyusunan Perda PKP	dokumen			0%	Rp	0,00	0,00%	Rp	-	28,57%	Rp	100.000.000	71,43%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	350.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	300.000.000	50,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	600.000.000
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan hasil identifikasi di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	500.000.000	50,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	1.000.000.000
		Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah laporan hasil identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	95,69%	Rp	450.000.000	4,31%	Rp	450.000.000	100%	Rp	10.450.000.000
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah laporan hasil pendataan rumah korban bencana hasil pendataan yang bencana kejadian sebelumnya belum tertangani	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	96,39%	Rp	300.000.000	3,61%	Rp	300.000.000	100%	Rp	8.300.000.000
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah laporan hasil pendataan rumah hasil pendataan kerusakan akibat bencana	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	70,00%	Rp	300.000.000	30,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	1.000.000.000
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah penerima rumah hasil verifikasi bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	76,92%	Rp	300.000.000	23,08%	Rp	300.000.000	100%	Rp	1.300.000.000
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	95,31%	Rp	300.000.000	4,69%	Rp	300.000.000	100%	Rp	6.400.000.000
		Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah peserta Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terlaksana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	95,24%	Rp	300.000.000	4,76%	Rp	300.000.000	100%	Rp	6.300.000.000
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah peserta Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terlaksana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	62,50%	Rp	300.000.000	37,50%	Rp	300.000.000	100%	Rp	800.000.000
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana yang terlaksana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	62,50%	Rp	300.000.000	37,50%	Rp	300.000.000	100%	Rp	800.000.000
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah peserta Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terlaksana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	300.000.000	50,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	600.000.000
		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP yang terlaksana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	300.000.000	50,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	600.000.000
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah tim untuk pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk	tim		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	250.000.000	100,00%	Rp	250.000.000	100%	Rp	250.000.000
		Rembu warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Jumlah warga negara calon penerima rumah bagi korban bencana	orang		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	300.000.000	100,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000
		Koordinasi untuk menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah laporan hasil koordinasi kesepakatan penerima dan jenis pelayanan	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	500.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun dan direhabilitasi	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	10.000.000.000	100,00%	Rp	11.000.000.000	100%	Rp	11.000.000.000
		Rehabilitasi Rumah Bagi korban Bencana	Jumlah rumah rehabilitasi bagi korban bencana	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	8.000.000.000	100,00%	Rp	10.000.000.000	100%	Rp	10.000.000.000
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	laporan	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	700.000.000	100,00%	Rp	900.000.000	100%	Rp	900.000.000
		Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah lahan pengadaan untuk pembangunan bagi korban bencana	lahan	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	1.000.000.000	100,00%	Rp	1.200.000.000	100%	Rp	1.200.000.000
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	6.100.000.000	100,00%	Rp	6.500.000.000	100%	Rp	6.500.000.000
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi yang terbangun	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	6.000.000.000	100,00%	Rp	6.500.000.000	100%	Rp	6.500.000.000
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan yang beroperasi dan terpelihara lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	500.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	jumlah rumah hasil distribusi dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	laporan	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	500.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang bagi korban bencana atau relokasi program provinsi yang terlaksana	unit	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	300.000.000	100,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah laporan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	laporan	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	300.000.000	100,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

		Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial Provinsi	Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni		Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	650.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	650.000.000	BIDANG PERUMAHAN
		Verifikasi bantuan Rumah korban Bencana	Jumlah verifikasi Rumah Korban Bencana	unit			0%	0,00	0,00%	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Pembangunan Rumah korban Bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana	unit			0%	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah terkena relokasi program pemerintah	unit			0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	500.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	500.000.000	
		Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah korban Bencana Provinsi yang direhabilitasi yang disediakan	unit			0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	150.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	150.000.000	
		Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Capaian Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh				100%	15.551.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	15.551.000	BIDANG PERMUKIMAN
		Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penetapan Kawasan Kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur tentang penetapan Kawasan Kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	100.000.000	0%	0,00	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0%	Rp	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kawasan kumuh yang menjadi target sosialisasi	kawasan	Rp	60.000.000	0%	15.551.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	15.551.000	
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kawasan permukiman kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp	50.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Capaian Luasan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	Rp	500.000.000	#DIV/0!	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	687.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%			
		Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	Capaian Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman				100%	3.341.725.737,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	3.341.725.737	BIDANG PERMUKIMAN
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	kegiatan			100%	2.528.220.693,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	2.528.220.693	
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	kegiatan			100%	813.505.044,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	813.505.044	
		Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman	Capaian Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman				100%	127.000.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	127.000.000	BIDANG PERMUKIMAN
		Pengadaan Utilitas lampu jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	unit			0%	127.000.000,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Program Identifikasi Kawasan Permukiman	Capaian Identifikasi Kawasan Permukiman				100%	248.613.607,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	248.613.607	BIDANG PERMUKIMAN
		Identifikasi Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen			100%	117.182.414,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	117.182.414	
		Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen			100%	131.431.193,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	131.431.193	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

		Program lingkungan sehat perumahan	Capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU		Rp	500.000.000	0%	0,00	26,21%	Rp	1.829.685.000	73,79%	Rp	5.150.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	6.979.685.000	BIDANG PERMUKIMAN
		Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Peningkatan dan pemeliharaan prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan yang tertangani dengan PSU	ha			0%	0,00	75,93%	Rp	1.577.500.000	24,07%	Rp	500.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	2.077.500.000	
		Identifikasi Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen			0%	0,00	50,22%	Rp	252.185.000	49,78%	Rp	250.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	502.185.000	
		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan (Solar Cell)	Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu jalan (Solar Cell)	unit			0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	250.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	250.000.000	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas PSU Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah luas kawasan yang tertangani dengan PSU di kawasan permukiman kumuh	Ha			0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	1.000.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	1.000.000.000	
		Koordinasi, monitoring, dan Evaluasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi	laporan	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	150.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	150.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kawasan kumuh yang menjadi target sosialisasi	kawasan	Rp	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Luasan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	ha	Rp	500.000.000	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Penyusunan Masterplan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minawisata Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Penyusunan Masterplan dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Minawisata Provinsi Sulawesi Barat	dokumen			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Identifikasi Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Pengadaan Motor sampah	Jumlah pengadaan motor sampah	unit	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Pengadaan Utilitas lampu jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	unit	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perkotaan	jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	unit	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perdesaan	jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	unit	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-	
		Study Kelayakan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Study kelayakan Kawasan Permukiman	dokumen	Rp	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	
		Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman	Jumlah Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Permukiman Permukiman yang terbangun	dokumen	Rp	-	0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	3.000.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	3.000.000.000	
		Peningkatan Sumber Daya manusia	Persentase Sumber Daya Manusia				100%	413.885.829,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	413.885.829	
		Bimbingan Teknis Bidang Permukiman	Jumlah orang bimbingan Teknis	orang			100%	173.377.829,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	173.377.829	
		Forum koordinasi terkait Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan pertemuan				100%	20.488.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	20.488.000	
		Bench Marking Kawasan Permukiman	Jumlah orang yang ikut Bench Marking	orang			100%	220.020.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	220.020.000	
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase pemberdayaan POKJA				0%	0,00	100,00%	Rp	100.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	100.000.000	
		Fasilitasi Kelompok kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	kelompok			0%	0,00	100,00%	Rp	100.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	100.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

						0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	43,65%	Rp	8.250.000.000	56,35%	Rp	10.650.000.000	100,00%	Rp	18.900.000.000	BIDANG PERMUKIMAN	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan kawasan permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum																					
		Perencanaan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman	dokumen										44,44%	Rp	800.000.000	55,56%	Rp	1.000.000.000	100%	Rp	1.800.000.000		
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kawasan permukiman dengan penyediaan prasarana sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi permukiman	Kawasan										41,67%	Rp	5.000.000.000	58,33%	Rp	7.000.000.000	100%	Rp	12.000.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	laporan										42,86%	Rp	600.000.000	57,14%	Rp	800.000.000	100%	Rp	1.400.000.000		
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	1.250.000.000	50,00%	Rp	1.250.000.000	100,00%	Rp	2.500.000.000	Bidang Perumahan
		Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah orang atau badan hukum yang mendapatkan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	orang dan/atau badan hukum										50,00%	Rp	600.000.000	50,00%	Rp	600.000.000	100%	Rp	1.200.000.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	laporan										50,00%	Rp	650.000.000	50,00%	Rp	650.000.000	100%	Rp	1.300.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017-2022

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2018-2022 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT																
NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Bidang Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
				7.796,45		Rp 5.880		Rp 15.000		Rp 55.896,43		Rp 62.671.596.602,40		Rp 147.244.483.128		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		13,67%	1.389,54	13,77%	Rp 1.399	14,81%	Rp 1.505	28,87%	Rp 2.934	28,87%	Rp 2.934	100,00%	Rp 10.162	SEKRETARIAT
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana Aparatur		17,56%	893,23	6,90%	Rp 351	11,99%	Rp 610	31,63%	Rp 1.609	31,92%	Rp 1.624	100,00%	Rp 5.087	SEKRETARIAT
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1,50%	31,92	11,65%	Rp 248	16,24%	Rp 345	35,30%	Rp 750	35,30%	Rp 750	100,00%	Rp 2.124	SEKRETARIAT
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3,33%	233,07	10,76%	Rp 754	12,99%	Rp 910	36,04%	Rp 2.525	36,89%	Rp 2.585	100,00%	Rp 7.007	SEKRETARIAT
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		8,54%	59,00	20,80%	Rp 144	18,82%	Rp 130	25,92%	Rp 179	25,92%	Rp 179	100,00%	Rp 691	SEKRETARIAT
6	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		100,00%	1.042,92	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 1.043	BIDANG PERUMAHAN
7	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan warga negara yang terkena bencana provinsi atau relokasi program pemerintah		0,00%	0,00	1,20%	Rp 1.055	6,49%	Rp 5.700	43,71%	Rp 38.400	48,60%	Rp 42.700	100,00%	Rp 87.855	BIDANG PERUMAHAN
8	Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial Provinsi	Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni		0,00%	0,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 650	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 650	BIDANG PERUMAHAN
9	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		100,00%	15,55	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 16	BIDANG PERMUKIMAN
10	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	Cakupan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman		100,00%	3.341,73	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 3.342	BIDANG PERMUKIMAN
11	Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman	Capaian Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman		100,00%	127,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 127	BIDANG PERMUKIMAN
12	Program Identifikasi Kawasan Permukiman	Capaian Identifikasi Kawasan Permukiman		100,00%	248,61	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 249	BIDANG PERMUKIMAN
13	Program lingkungan sehat perumahan	Capaian lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU		0,00%	0,00	26,21%	Rp 1.830	73,79%	Rp 5.150	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 6.980	BIDANG PERMUKIMAN
14	Peningkatan Sumber Daya manusia	Persentase Sumber Daya Manusia		100,00%	413,89	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 414	BIDANG PERMUKIMAN
15	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase pemberdayaan POKJA		0,00%	0,00	100,00%	Rp 100	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	100,00%	Rp 100	BIDANG PERUMAHAN
16	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan kawasan permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum		0,00%	0,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	43,65%	Rp 8.250	56,35%	Rp 10.650	100,00%	Rp 18.900	BIDANG PERMUKIMAN
17	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		0,00%	0,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	50,00%	Rp 1.250	50,00%	Rp 1.250	100,00%	Rp 2.500	BIDANG PERUMAHAN



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sulawesi Barat merupakan panduan kerja bagi dinas perumahan dan kawasan permukiman selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman disusun berdasarkan kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja program Gubernur/Wakil Gubernur. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan menopang perwujudan pembangunan daerah yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *Masyarakat* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 Nomor 8 Tahun 2017. Dokumen renstra ini

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;

dinas perumahan dan kawasan permukiman berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan Renstra;

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2017-2022, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
2. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2017-2022 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 sesuai dengan tupoksi dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam untuk memastikan pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi
Sulawesi Barat,

RACHMAD, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197302191994021004

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROPINSI SULAWESI BARAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcame)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Bidang Penanggung Jawab		
					2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (juta)			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1	1	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7.796.452.649,39		Rp 5.880.000.000		Rp 15.000.000.000		Rp 58.042.856.936,70		Rp 64.094.241.845,27		Rp 150.813.551.431			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rp 679.690.000	14%	1.389.538.750,00	14%	Rp 1.399.434.150	15,94%	Rp 1.637.000.000	28%	Rp 2.898.856.937	29%	Rp 2.946.507.969	100%	Rp 10.271.337.806	SEKRETARIAT	
0	0	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	jenis	Rp 49.190.000	7%	32.320.750,00	7,28%	Rp 31.991.250	17,07%	Rp 75.000.000	34,14%	Rp 150.000.000	34,14%	Rp 150.000.000	100%	Rp 439.312.000
0	0	1	8	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi ke dalam daerah	rapat	Rp 211.100.000	11%	200.800.000,00	13,84%	Rp 250.800.000	14,35%	Rp 260.000.000	30,36%	Rp 550.000.000	30,36%	Rp 550.000.000	100%	Rp 1.811.600.000
0	0	1	7	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi ke luar daerah	rapat	Rp 225.405.200	17%	401.500.000,00	15,20%	Rp 351.500.000	15,56%	Rp 360.000.000	25,94%	Rp 600.000.000	25,94%	Rp 600.000.000	100%	Rp 2.313.000.000
0	0	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah media cetak yang digunakan	media	Rp 60.000.000	4%	9.100.000,00	6,01%	Rp 14.780.000	29,28%	Rp 72.000.000	30,50%	Rp 75.000.000	30,50%	Rp 75.000.000	100%	Rp 245.880.000
0	0	1	4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa jaminan barang milik Negara	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	50,00%	Rp 30.000.000	50,00%	Rp 30.000.000	100%	Rp 60.000.000
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa tenaga pendukung administrasi	OK		20%	529.800.000,00	20,02%	Rp 533.900.000	20,02%	Rp 534.000.000	20,05%	Rp 534.800.000	20,05%	Rp 534.800.000	100%	Rp 2.667.300.000
0	0	1	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	Rp 32.000.000	10%	65.598.000,00	7,00%	Rp 47.188.000	9,05%	Rp 61.000.000	37,10%	Rp 250.000.000	37,10%	Rp 250.000.000	100%	Rp 673.786.000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening kebutuhan telepon/jaringan internet dan Listrik	rekening	Rp 72.000.000	12%	69.420.000,00	13,98%	Rp 83.754.900	23,37%	Rp 140.000.000	24,89%	Rp 149.056.937	26,16%	Rp 156.707.969	100%	Rp 598.939.806
0	0	1	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat	rapat	Rp 29.994.800	8%	60.800.000,00	8,50%	Rp 65.120.000	10,44%	Rp 80.000.000	33,95%	Rp 260.000.000	39,17%	Rp 300.000.000	100%	Rp 765.920.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak, penggandaan dan penjiilidan dokumen	cetak		3%	20.200.000,00	2,93%	Rp 20.400.000	7,91%	Rp 55.000.000	43,13%	Rp 300.000.000	43,13%	Rp 300.000.000	100%	Rp 695.600.000
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 1.418.000.000	16%	893.231.857,00	6,11%	Rp 351.030.000	14,70%	Rp 845.000.000	32,19%	Rp 1.850.000.000	31%	Rp 1.808.733.876	100%	Rp 5.747.995.733	SEKRETARIAT	
	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	Rp 200.000.000	37%	408.680.000,00	5,03%	Rp 55.000.000	16,46%	Rp 180.000.000	18,29%	Rp 200.000.000	22,86%	Rp 250.000.000	100%	Rp 1.093.680.000
	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	unit		5%	33.101.857,00	14,54%	Rp 90.680.000	16,03%	Rp 100.000.000	32,06%	Rp 200.000.000	32,06%	Rp 200.000.000	100%	Rp 623.781.857
	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara per bulan	unit	Rp 68.000.000	16%	199.610.000,00	13,85%	Rp 175.140.000	15,02%	Rp 190.000.000	27,67%	Rp 350.000.000	27,67%	Rp 350.000.000	100%	Rp 1.264.750.000
	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Tenaga Cleaning Servis, Penjaga malam dan administrasi yang terbayarkan	unit	Rp 150.000.000	31%	251.840.000,00	0,00%	Rp -	18,71%	Rp 150.000.000	24,94%	Rp 200.000.000	24,94%	Rp 200.000.000	100%	Rp 801.840.000
	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (motor dan mobil)	unit	Rp 1.000.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp -	13,29%	Rp 170.000.000	50,83%	Rp 650.000.000	35,87%	Rp 458.733.876	100%	Rp 1.278.733.876
	0	2	1	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan perlengkapan mebeleur kantor	unit		0%	4.41%	Rp 30.210.000	8,03%	Rp 55.000.000	36,49%	Rp 250.000.000	51,08%	Rp 350.000.000	100%	Rp 685.210.000	
0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp -	2%	31.916.265,00	12,02%	Rp 247.555.000	18,45%	Rp 380.000.000	36,42%	Rp 750.000.000	32%	Rp 650.000.000	100%	Rp 2.059.471.265	SEKRETARIAT	
0	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat sipil negara (pegawai) dalam pendidikan dan pelatihan formal	orang	Rp -	5%	31.916.265,00	0,00%	Rp -	12,09%	Rp 80.000.000	45,32%	Rp 300.000.000	37,77%	Rp 250.000.000	100%	Rp 661.916.265
0	0	5	2	Bimbingan Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknik bidang perumahan dan permukiman	orang	Rp -	0%	0,00	30,65%	Rp 176.770.000	17,34%	Rp 100.000.000	26,01%	Rp 150.000.000	26,01%	Rp 150.000.000	100%	Rp 576.770.000
0				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp -	0%	0,00	15,04%	Rp 70.785.000	21,24%	Rp 100.000.000	31,86%	Rp 150.000.000	31,86%	Rp 150.000.000	100%	Rp 470.785.000
0	0	5	3	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang ikut dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	orang	Rp -	0%	0,00%	28,57%	Rp -	28,57%	Rp 100.000.000	42,86%	Rp 150.000.000	28,57%	Rp 100.000.000	100%	Rp 350.000.000

0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			3%	233.072.726,39	11,10%	Rp	753.605.850	13,04%	Rp	885.000.000	35,22%	Rp	2.390.000.000	37%	Rp	2.525.000.000	100%	Rp	6.786.678.576	SEKRETARIAT				
		Penyusunan Renstra/Renja/Lakip/ dan LPPD	Jumlah laporan yang telah disusun	dokumen	Rp	-	0,00	0,00%	Rp	10.000.000	0,00%	Rp	35.000.000	0,00%	Rp	50.000.000	0,00%	Rp	50.000.000	0%	Rp	145.000.000					
0	6	5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban SKPD	laporan	Rp	-	0%		13,64%	Rp	15.000.000	13,64%	Rp	15.000.000	36,36%	Rp	40.000.000	36,36%	Rp	40.000.000	100%	Rp	110.000.000			
			Penyusunan Katalog Data Perumahan	Jumlah katalog data informasi yang telah disediakan	katalog	Rp	-	0%		0,00%	Rp	-	33,33%	Rp	50.000.000	33,33%	Rp	50.000.000	33,33%	Rp	50.000.000	100%	Rp	150.000.000			
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	laporan	Rp	-	0%		7,87%	Rp	11.100.000	31,89%	Rp	45.000.000	31,89%	Rp	45.000.000	28,35%	Rp	40.000.000	100%	Rp	141.100.000			
			Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan/SPI/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD	Jumlah laporan Pertanggung jawaban keuangan/SPI/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD yang tersusun	laporan	Rp	-	0%		16,67%	Rp	19.000.000	13,16%	Rp	15.000.000	35,09%	Rp	40.000.000	35,09%	Rp	40.000.000	100%	Rp	114.000.000			
			Pengembangan Basis data, dan pemutakhiran Sistem Informasi perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah kegiatan untuk pengembangan data yang akurat dalam sistem informasi di Provinsi Sulawesi Barat	kegiatan	Rp	-	0%		30,06%	Rp	386.760.000	7,77%	Rp	100.000.000	31,09%	Rp	400.000.000	31,09%	Rp	400.000.000	100%	Rp	1.286.760.000			
			Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah laporan perencanaan yang tersedia	laporan	Rp	-	0%		0,00%	Rp	-	3,61%	Rp	15.000.000	48,19%	Rp	200.000.000	48,19%	Rp	200.000.000	100%	Rp	415.000.000			
			Penyusunan LPPD SKPD	Jumlah dokumen LPPD SKPD	dokumen	Rp	-	0%		0,00%	Rp	-	4,76%	Rp	10.000.000	23,81%	Rp	50.000.000	71,43%	Rp	150.000.000	100%	Rp	210.000.000			
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan manajemen aset	dokumen	Rp	15.350.000	4%		9.759.250,00	8,10%	Rp	22.000.000	14,72%	Rp	40.000.000	36,80%	Rp	100.000.000	36,80%	Rp	100.000.000	100%	Rp	271.759.250		
			Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen RKAP/DPPA-SKPD	dokumen	Rp	-	0%		0,00	10,09%	Rp	12.350.000	8,17%	Rp	10.000.000	40,87%	Rp	50.000.000	40,87%	Rp	50.000.000	100%	Rp	122.350.000		
			Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan	Rp	-	7%		8.400.000,00	4,40%	Rp	5.450.000	8,07%	Rp	10.000.000	40,37%	Rp	50.000.000	40,37%	Rp	50.000.000	100%	Rp	123.850.000		
			Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta Musrebang	Jumlah dokumen Renja dan Evaluasi SKPD serta Musrebang	dokumen	Rp	-	11%		100.782.000,00	15,58%	Rp	147.797.000	10,54%	Rp	100.000.000	31,63%	Rp	300.000.000	31,63%	Rp	300.000.000	100%	Rp	948.579.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	laporan	Rp	-	4%		49.531.476,39	3,76%	Rp	46.868.750	12,03%	Rp	150.000.000	40,12%	Rp	500.000.000	40,12%	Rp	500.000.000	100%	Rp	1.246.400.226		
			Penyediaan Pengelolaan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah tenaga honorer yang terbayarkan	Orang	Rp	-	0%		0,00%	Rp	-	15,38%	Rp	20.000.000	38,46%	Rp	50.000.000	46,15%	Rp	60.000.000	100%	Rp	130.000.000			
			Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD	dokumen	Rp	22.150.000	14%		45.700.000,00	19,74%	Rp	64.100.000	20,01%	Rp	65.000.000	23,09%	Rp	75.000.000	23,09%	Rp	75.000.000	100%	Rp	324.800.000		
			Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	laporan	Rp	-	9%		8.900.000,00	5,22%	Rp	5.450.000	9,58%	Rp	10.000.000	38,33%	Rp	40.000.000	38,33%	Rp	40.000.000	100%	Rp	104.350.000		
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	dokumen			0%		0,00%	Rp	-	25,93%	Rp	70.000.000	37,04%	Rp	100.000.000	37,04%	Rp	100.000.000	100%	Rp	270.000.000			
			Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	dokumen			0%		0,00%	Rp	-	29,58%	Rp	105.000.000	30,99%	Rp	110.000.000	39,44%	Rp	140.000.000	100%	Rp	355.000.000			
0			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Rp	-	9%		10.000.000,00	7,18%	Rp	7.730.100	9,28%	Rp	10.000.000	37,13%	Rp	40.000.000	37,13%	Rp	40.000.000	100%	Rp	107.730.100		
0	0		Penyelenggaraan forum SKPD	Jumlah orang yang mengikuti forum	orang	Rp	-	0%		0,00	0,00%	Rp	-	4,76%	Rp	10.000.000	47,62%	Rp	100.000.000	47,62%	Rp	100.000.000	100%	Rp	210.000.000		
0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur				6%		59.000.000,00	15,11%	Rp	143.690.000	25,24%	Rp	240.000.000	26,72%	Rp	254.000.000	27%	Rp	254.000.000	100%	Rp	950.690.000	SEKRETARIAT	
0	3	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	pasang	Rp	12.000.000	16%		59.000.000,00	12,03%	Rp	45.000.000	24,06%	Rp	90.000.000	24,06%	Rp	90.000.000	24,06%	Rp	90.000.000	100%	Rp	374.000.000		
		3	5	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu yang diadakan	pasang	Rp	-	0%		0,00	15,12%	Rp	74.790.000	28,29%	Rp	140.000.000	28,29%	Rp	140.000.000	28,29%	Rp	140.000.000	100%	Rp	494.790.000	
			Pembuatan atribut PNS	Jumlah atribut PNS yang diadakan	paket	Rp	-	0%		0,00	29,18%	Rp	23.900.000	12,21%	Rp	10.000.000	29,30%	Rp	24.000.000	29,30%	Rp	24.000.000	100%	Rp	81.900.000		

			Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi		Rp 85.546.300	0%	0,00	0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	Rp - 0	BIDANG PERUMAHAN	
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp 36.082.000	0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring, evaluasi	laporan	Rp 49.464.300	0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%		
			Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Rp 314.380.000	100%	1.042.916.878,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 1.042.916.878	BIDANG PERUMAHAN		
			Sosialisasi Rumah Khusus (Nelayan, Suku Adat Terpencil) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp 14.380.000	0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%		
			Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp 300.000.000	100%	656.000.000,00	0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 100%	Rp 656.000.000			
			Sosialisasi Rumah Swadaya Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp 14.380.000	0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%		
			Sosialisasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp -	0%	135.600.000,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp 135.600.000		
			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp 50.000.000	100%	135.179.878,00	0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 100%	Rp 135.179.878			
			Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	laporan	Rp 50.000.000	100%	116.137.000,00	0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 100%	Rp 116.137.000			
			Sosialisasi Rumah Umum dan Komersil Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	orang	Rp -	0%	0,00	0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%	Rp - 0%		
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga Negara yang terkena Bencana Provinsi atau Relokasi Program Pemerintah provinsi		Rp 20.000.000	0%	Rp -	1,27%	Rp 1.055.000.000	4,16%	Rp 3.463.000.000	45,18%	Rp 37.600.000.000	49,39%	Rp 41.110.000.000	100%	Rp 83.228.000.000	BIDANG PERUMAHAN
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang pembangunan dan rehabilitasi perumahan Masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang pembangunan dan rehabilitasi Perumahan masyarakat miskin	dokumen		0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 300.000.000			
			Pembangunan dan rehabilitasi perumahan Masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi Perumahan masyarakat miskin	unit		0%	0,00	0,00%	Rp - 83,33%	Rp 2.500.000.000	16,67%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 3.000.000.000				
			Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi masyarakat miskin (Marasa)	Jumlah Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi masyarakat miskin (Marasa)	laporan		0%	0,00	21,91%	Rp 200.000.000	28,81%	Rp 263.000.000	49,29%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 913.000.000			
			Masterplan kawasan Perumahan Aparatur Sipil Negara ASN dan Kawasan Perumahan ASN Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Masterplan kawasan Perumahan Aparatur Sipil Negara ASN dan Kawasan Perumahan ASN Provinsi Sulawesi Barat	dokumen			0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100,00%	q	0,00%	Rp - #VALUE!	Rp 450.000.000				
			Pemeliharaan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)	Jumlah Pemeliharaan Rumah Susun Sewa	unit		0%	0,00	0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100,00%	Rp - 0,00%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 300.000.000				
			Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat (RISHA)	Jumlah Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat (RISHA)	unit	Rp -	0%	0,00	34,07%	Rp 155.000.000	0,00%	Rp - 65,93%	Rp - 0,00%	Rp - 100%	Rp 455.000.000				

			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp	-	0%	0,00	16,67%	Rp	100.000.000	33,33%	Rp	200.000.000	50,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	600.000.000	
			Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah laporan hasil sinkronisasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman	laporan	Rp	-	0%	0,00	25,00%	Rp	100.000.000	0,00%	Rp	-	75,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	400.000.000	
			Sosialisasi Tentang Perumahan	Jumlah peserta yang terlibat dalam Sosialisasi Rumah Umum dan Komersil Provinsi Sulawesi Barat	orang	Rp	20.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	300.000.000	
			Penyusunan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Sulawesi Barat	dokumen			0%	0,00	60,00%	Rp	450.000.000	0,00%	Rp	-	40,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	750.000.000	
			Penyusunan Peraturan Gubernur Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Rangsang Mamuju	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Rangsang Mamuju	dokumen			0%	0,00	14,29%	Rp	50.000.000	0,00%	Rp	-	85,71%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	350.000.000	
			Fasilitasi Kelompok kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	kelompok			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	300.000.000	
			Penyusunan Perda PKP	Jumlah dokumen Penyusunan Perda PKP	dokumen			0%	0,00	0,00%	Rp	-	62,50%	Rp	500.000.000	37,50%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	800.000.000	
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah hasil pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	57,14%	Rp	300.000.000	42,86%	Rp	300.000.000	100%	Rp	700.000.000	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan hasil identifikasi di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	44,44%	Rp	500.000.000	55,56%	Rp	500.000.000	100%	Rp	900.000.000	
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah laporan hasil identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	95,69%	Rp	450.000.000	4,31%	Rp	450.000.000	100%	Rp	10.450.000.000	
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah korban bencana hasil pendataan yang bencana kejadian sebelumnya belum tertangani				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	96,39%	Rp	450.000.000	3,61%	Rp	300.000.000	100%	Rp	8.300.000.000	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah hasil pendataan kerusakan akibat bencana				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	76,92%	Rp	300.000.000	23,08%	Rp	300.000.000	100%	Rp	1.300.000.000	
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah penerima rumah hasil verifikasi bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	76,92%	Rp	300.000.000	23,08%	Rp	300.000.000	100%	Rp	1.300.000.000	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	94,83%	Rp	300.000.000	5,17%	Rp	300.000.000	100%	Rp	5.800.000.000	
			Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terlibat sebagai peserta dalam Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	94,83%	Rp	300.000.000	5,17%	Rp	300.000.000	100%	Rp	5.800.000.000	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terlibat sebagai peserta dalam Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	62,50%	Rp	300.000.000	37,50%	Rp	300.000.000	100%	Rp	800.000.000	
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang terlibat sebagai peserta dalam Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	57,14%	Rp	300.000.000	42,86%	Rp	300.000.000	100%	Rp	700.000.000	
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang terlibat sebagai peserta dalam sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	300.000.000	50,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	600.000.000	
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang terlibat sebagai peserta dalam Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan				0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	40,00%	Rp	300.000.000	60,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	500.000.000	

			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah tim untuk pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	300.000.000	100,00%	Rp	250.000.000	100%	Rp	250.000.000	
			Rebug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	Jumlah warga negara calon penerima rumah bagi korban bencana			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	400.000.000	100,00%	Rp	300.000.000	100%	Rp	300.000.000	
			Koordinasi untuk menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah laporan hasil koordinasi kesepakatan penerima dan jenis pelayanan			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	400.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program provinsi yang dibangun dan direhabilitasi			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	10.000.000.000	100,00%	Rp	10.000.000.000	100%	Rp	10.000.000.000	
			Rehabilitasi Rumah Bagi korban Bencana	Jumlah rumah rehabilitasi bagi korban bencana			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	8.000.000.000	100,00%	Rp	9.000.000.000	100%	Rp	9.000.000.000	
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	1.000.000.000	100,00%	Rp	1.000.000.000	100%	Rp	1.000.000.000	
			Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah lahan pengadaan untuk pembangunan bagi korban bencana			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	1.000.000.000	100,00%	Rp	1.100.000.000	100%	Rp	1.100.000.000	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana yang terbangun			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	5.500.000.000	100,00%	Rp	6.500.000.000	100%	Rp	6.500.000.000	
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi yang terbangun			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	5.500.000.000	100,00%	Rp	7.000.000.000	100%	Rp	7.000.000.000	
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan yang beroperasi dan terpelihara lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	500.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah hasil distribusi dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	400.000.000	100,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	500.000.000	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah yang bagi korban bencana atau relokasi program provinsi yang terlaksana	unit		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	300.000.000	100,00%	Rp	310.000.000	100%	Rp	310.000.000	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah laporan hasil Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	laporan		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	200.000.000	100,00%	Rp	200.000.000	100%	Rp	200.000.000	
			Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial Provinsi	Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni		Rp	0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	650.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	650.000.000	BIDANG PERUMAHAN
			Verifikasi bantuan Rumah korban Bencana	Jumlah verifikasi Rumah Korban Bencana	unit		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	
			Pembangunan Rumah korban Bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang terbangun	unit		0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	
			Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah yang difasilitasi penediannya	unit		0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	500.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	500.000.000	
			Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah korban Bencana Provinsi yang direhabilitasi dan disediakan	unit		0%	0,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	150.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	150.000.000	

			Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh			100%	15.551.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	15.551.000	BIDANG PERMUKIMAN	
			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penetapan Kawasan Kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	jumlah dokumen hasil penyusunan Peraturan Gubernur tentang penetapan Kawasan Kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	100.000.000	0%	0,00	0,00%												0%	Rp	-	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan permukiman kumuh Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kawasan kumuh yang menjadi target sosialisasi	kawasan	Rp	60.000.000	0%	15.551.000,00	0,00%	Rp	-	0%	Rp	15.551.000										
			Koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan permukiman kumuh Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah koordinasi, monitoring dan Evaluasi	laporan	Rp	50.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-										
			Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Luasan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	Rp	500.000.000	#DIV/0!	0,00	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-										
			Penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan Masterplan Provinsi Sulawesi Barat	dokumen	Rp	687.000.000	0%	0,00	0,00%	Rp	-	0%												
			Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman	Cakupan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman				100%	3.341.725.737,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	3.341.725.737	BIDANG PERMUKIMAN									
			Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perkotaan	jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	kegiatan			100%	2.528.220.693,00	0,00%	Rp	-	100%	Rp	2.528.220.693										
			Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) - Kawasan Permukiman Perdesaan	jumlah pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas	kegiatan			100%	813.505.044,00	0,00%	Rp	-	100%	Rp	813.505.044										
			Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman	Capaian Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman				100%	127.000.000,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	127.000.000	BIDANG PERMUKIMAN									
			Pengadaan Utilitas lampu jalan	Jumlah pengadaan lampu jalan	unit			0%	127.000.000,00	0,00%	Rp	-	0%	Rp	-										
			Program Identifikasi Kawasan Permukiman	Capaian Identifikasi Kawasan Permukiman				100%	248.613.607,00	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	248.613.607	BIDANG PERMUKIMAN									
			Identifikasi Kawasan Permukiman Perkotaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen			100%	117.182.414,00	0,00%	Rp	-	100%	Rp	117.182.414										
			Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kawasan permukiman	dokumen			100%	131.431.193,00	0,00%	Rp	-	100%	Rp	131.431.193										

			Peningkatan Sumber Daya manusia	Persentase Sumber Daya Manusia			100%	413.885.829,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100,00%	Rp	413.885.829					
			Bimbingan Teknis Bidang Permukiman	Jumlah orang bimbingan Teknis	orang		100%	173.377.829,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	173.377.829					
			Forum koordinasi terkait Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan pertemuan			100%	20.488.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	20.488.000					
			Bench Marking Kawasan Permukiman	Jumlah orang yang ikut Bench Marking	orang		100%	220.020.000,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	100%	Rp	220.020.000					
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase pemberdayaan POKJA			0%	0,00	50,00%	Rp	100.000.000	50,00%	Rp	100.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	200.000.000					
			Fasilitasi Kelompok kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	kelompok		0%	0,00	50,00%	Rp	100.000.000	50,00%	Rp	100.000.000	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	200.000.000					
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase kawasan Permukiman yang ditingkatkan Prasarana Sarana dan utilitas Umum			0%	0,00	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	44,81%	Rp	10.800.000.000	55,19%	Rp	13.300.000.000	100,00%	Rp	24.100.000.000	BIDANG PERMUKIMAN	
			Perencanaan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman	dokumen									57,14%	Rp	2.000.000.000	42,86%	Rp	1.500.000.000	100%	Rp	3.500.000.000			
			Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kawasan permukiman dengan penyediaan prasarana sarana dan utilitas untuk menunjang fungsi permukiman	Kawasan									47,98%	Rp	8.300.000.000	52,02%	Rp	9.000.000.000	100%	Rp	17.300.000.000			
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	laporan									50,00%	Rp	500.000.000	50,00%	Rp	500.000.000	100%	Rp	1.000.000.000			
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah orang atau badan hukum yang mendapatkan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta			0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	50,00%	Rp	1.500.000.000	50,00%	Rp	1.500.000.000	100,00%	Rp	3.000.000.000	Bidang Perumahan
			Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah orang atau badan hukum yang mendapatkan sertifikasi dan registrasi perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	orang dan/atau badan hukum									50,00%	Rp	800.000.000	50,00%	Rp	800.000.000	100%	Rp	1.600.000.000			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi terkait penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	laporan									50,00%	Rp	700.000.000	50,00%	Rp	700.000.000	100%	Rp	1.400.000.000			

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rachmad, SE., M. Si
NIP. 19730219 199402 1 004